

**LIVING THE REVELATION, AWAKENING
HUMANITY: READING SAYYID ALI
KHAMENEI AS A VANGUARD OF
CONTEMPORARY ISLAMIC CIVILIZATION**

Fithri Dzakiyyah Hafizah

MAARIF Institute for Culture and Humanity

fithri@maarifinstitute.org

Abstract

Sayyid Ali Khamenei is a globally scrutinized figure with a unique public image. He is not only deeply revered but also viewed as a highly controversial leader. His death has sparked a wave of global attention far more massive than ever before. Current global responses tend to polarize into two mainstream currents: Western narratives are oriented toward a negative essentialism that views Sayyid Ali Khamenei's leadership as rigid and oppressive. On the other hand, the narratives of his supporters tend to be confined within a positive essentialism that views his leadership as flawless, entirely devoid of internal dynamics. This epistemological impasse is the central problem this study seeks to untangle. To achieve this, this paper employs a qualitative content analysis method to dismantle the gap between these simplistic global narratives and the originality of his notions and actions throughout his leadership trajectory. This study attempt to map the dynamics of Khamenei's thought within the context of post-revolutionary domestic tensions, while simultaneously capturing how

Islamic principles and divine revelation are inclusively contextualized into modern realities. Through a decolonial analytical framework, this study argues that Sayyid Ali Khamenei's thought cannot be reduced to a rigid form of theocracy. Instead, he offers a dynamic contemporary Islamic paradigm for transforming revelation into a system of governance, where Islamic and human values serve as the core foundation for establishing a humanizing social justice; one that both honours human dignity and drives the resurgence of Islamic civilization in the contemporary era.

Keywords: *Sayid Ali Khamenei, Western Hegemony, Revelation (Wahy), Humanity, Islamic Civilization.*

Abstrak

Sayid Ali Khamenei merupakan figur dalam sorotan dunia yang memiliki citra unik. Tidak hanya disegani, beliau juga dianggap sebagai sosok yang kontroversial. Peristiwa wafatnya beliau telah memantik sorotan global yang jauh lebih masif daripada sebelumnya. Respons dunia saat ini menunjukkan tren di dua arus utama: Arus narasi Barat berorientasi pada esensialisme negatif yang memandang kepemimpinan Sayid Ali Khamenei kaku dan opresif. Di sisi lain, narasi pendukungnya cenderung terkungkung pada esensialisme positif yang memandang kepemimpinan beliau sempurna tanpa hadirnya dinamika. Kebuntuan epistemologis inilah yang menjadi persoalan utama yang hendak diurai dalam studi ini. Guna mencapai tujuan tersebut, tulisan ini menerapkan metode kualitatif analisis konten (*content analysis*) untuk membongkar kesenjangan antara simplifikasi narasi global tersebut dengan orisinalitas gagasan serta kiprah beliau sepanjang masa kepemimpinannya. Studi ini memetakan dinamika pemikiran Khamenei dalam konteks ketegangan domestik pascarevolusi, sekaligus memotret bagaimana prinsip Islam dan nilai wahyu dikontekstualisasikan secara inklusif ke dalam realitas zaman modern. Melalui kerangka analisis dekolonial, studi ini berargumen bahwa pemikiran Sayid Ali Khamenei tidak dapat direduksi sebagai bentuk teokrasi yang kaku. Sebaliknya, beliau menawarkan sebuah paradigma Islam kontemporer yang dinamis dalam mentransformasikan wahyu ke dalam sistem pemerintahan, di mana nilai-nilai keislaman dan kemanusiaan dijadikan basis utama untuk menegakkan

keadilan sosial yang memanusiakan sekaligus menggerakkan kebangkitan peradaban Islam di era kontemporer.

Kata Kunci: *Sayid Ali Khamenei, Hegemoni Barat, Wahyu, Kemanusiaan, Peradaban Islam.*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Wafatnya Sayid Ali Khamenei bukanlah akhir dari sebuah kisah. Sebaliknya, tragedi yang telah merenggut nyawanya pada 28 Februari 2026 akibat serangan terkoordinasi Amerika Serikat dan Israel bersandi *Operation Epic Fury* (Wahyuni 2026) menjadi sebuah momentum transisi esensial dalam dialektika perjuangan menegakkan eksistensi dan kedaulatan peradaban Islam. Peristiwa ini menjadi sebuah titik balik di mana kalangan ulama, baik tokoh Islam Sunni maupun Syiah, yang sebelumnya kritis terhadap doktrin maupun sistem pemerintahan di Iran, mulai bersuara dengan memberikan pembelaan dan rasa hormat terhadap Sayid Ali Khamenei. Beberapa ulama senior non-Syiah, termasuk mufti Oman, seorang Cendekiawan terkemuka dari mazhab Islam Ibadi, telah mendeklarasikan Khamenei sebagai martir (*shahīd*). Mufti Sunni Irak bahkan berargumen bahwa semua Muslim harus mendukung Iran (Matthiesen 2026).

Tragedi martirnya Sayid Ali Khamenei tidak hanya berbuah dukungan dari kalangan muslim dunia secara luas, melainkan juga memicu gelombang protes warga Amerika Serikat dan negara sekutu yang menentang kebijakan presidennya sendiri. Menurut survei terbaru dari Pew Research Center, sekitar enam dari sepuluh orang Amerika (62%) tidak menyetujui cara Presiden Donald Trump menangani aksi militer terhadap Iran (Daniller 2026). Gaya kepemimpinan Trump yang cenderung berpusat pada diri sendiri (*Me-Centric*), mengutamakan kepentingan pribadi, serta bereaksi impulsif di media sosial dan pernyataan publik, berdampak pada *outcome* yang kontroversial dan memecah belah publik (Situmorang 2026).

Berbanding terbalik dengan presiden Amerika Serikat, sosok Sayid Ali Khamenei dikenal bukan sebagai pemimpin politik yang otoritasnya lekang oleh waktu atau dibatasi oleh masa kekuasaan jabatan. Sebagai Pemimpin Tertinggi (*Rahbar*) di Iran, beliau masyhur sebagai sosok pemimpin yang diteladani dan berkarakter kosmopolitan karena pengetahuannya yang luas di bidang humaniora (politik, sosiologi, ekonomi), hukum agama, serta pecinta sastra dan seni baik dalam bentuk puisi, musik, maupun novel (Ganji 2013, 26). Integritas kepemimpinannya berbasis pada kecemerlangan pemikirannya. Langkah politiknya tidak berorientasi pada melanggengkan kekuasaan dan keuntungan pribadi, melainkan untuk menjalankan sebuah pemerintahan berkeadilan yang membangun umat manusia untuk adaptif terhadap perkembangan zaman, dibuktikan dengan kemampuan untuk meraih pencapaian material, terobosan ilmiah, namun tetap berasaskan nilai-nilai kemanusiaan sekaligus menjaga nilai-nilai ketuhanan (Khamenei.ir 2017a). Karena itu, Sayid Ali Khamenei dikenal sebagai seorang fakih, pemimpin politik, juga intelektual Islam kontemporer yang berupaya mengintegrasikan spiritualitas, rasionalitas, dan keadilan sosial dalam kehidupan modern. Ia menyandarkan prinsip kepemimpinannya pada *tawhīd*, yang menggerakkannya untuk menyeimbangkan antara ilmu dan amal, iman dan keadilan, serta wahyu dan kehidupan manusia (Arif 2026).

Sejak masa kepemimpinannya sebagai *Rahbar* (Pemimpin Tertinggi Iran) pada 1989 hingga wafatnya di 2026, Sayid Ali Khamenei telah menjadi magnet bagi para cendekiawan yang mengkajinya secara lintas disiplin. Dunia mengakuinya sebagai sosok yang kuat (*powerful*) dan berpengaruh di panggung global (Sadjadpour 2009, 1). Namun, perhatian dunia terhadap Khamenei tidak berasal dari kekaguman semata, melainkan juga dari kalangan tertentu yang berupaya untuk mendelegitimasi pengaruh beliau. Selama 3,6 dekade masa kepemimpinannya, sederet kajian ilmiah yang diproduksi otoritas epistemik Barat—khususnya dari kalangan neo-orientalis—mencoba menggali asal usul ketanggungan Sayid Ali Khamenei dalam melanggengkan pemerintahan berlandaskan Revolusi Islam yang diwariskan pimpinan tertinggi sebelumnya,

Ayatullah Imam Khomeini. Mereka sengaja mencari titik lemah yang dapat disusupi, namun berakhir dibuat bingung dan heran dengan realitas Pemimpin Tertinggi Iran tersebut yang mampu bertahan dengan sistem pemerintahan yang berasas pada hukum dan nilai Islam begitu lama, meski digempur tanpa henti oleh krisis legitimasi, isu sektarian, dan sanksi ekonomi yang ekstrim (Ḥalaḡī 2023, 3).

Dalam literatur neo-orientalis mengenai Sayid Ali Khamenei, konsep politik bersandikan Islam yang digagas oleh beliau sering kali direduksi secara sepihak menjadi narasi sektarianistik. Tak hanya itu, narasi yang disajikan juga cenderung mendistorsi kisah hidupnya dan melabeli sistem kepemimpinannya sebagai sistem pemerintahan yang otoritarianisme dan ketinggalan zaman. Literatur semacam ini—yang sejak awal bias Barat dan tidak objektif—seringkali dikemas dengan judul yang meyakinkan, dan tersebar luas tanpa sekat dan filter di dunia maya. Tujuannya tentu saja untuk menarik perhatian masyarakat awam maupun peneliti pemula yang baru ingin mempelajari sosok beliau agar mendapatkan gambaran yang mengaburkan substansi asli dari transformasi kepemimpinan politik dan peradaban Islam yang dijalankan oleh Sayid Ali Khamenei. Tindakan ini merupakan salah satu manifestasi dari perang lunak (*soft war*) yang dilancarkan oleh Barat sejak masa awal kepemimpinannya sebagai Pemimpin Tertinggi Iran untuk menggoyang ketahanan dan stabilitas negara. Kesenjangan narasi inilah yang melatarbelakangi studi ini untuk melakukan peninjauan kritis mengenai kiprah Sayid Ali Khamenei dengan nuansa dekolonial atau otonom dari dikte epistemik Barat.

Peristiwa wafatnya Sayid Ali Khamenei menjadi momentum krusial untuk membangkitkan kembali khazanah pemikirannya, yang kini terasa kian relevan sebagai penerang bagi peradaban Islam kontemporer, sekaligus menjadi tawaran solusi di tengah krisis kemanusiaan global yang kian akut. Khamenei percaya bahwa dunia saat ini sedang berada di ambang pergeseran politik besar yang akan membuka jalan bagi munculnya “Tatanan Dunia Baru” (*New World Order*), sementara tatanan

lama, yang dipimpin oleh Amerika Serikat, kekuasaannya akan kian merosot (Hovsepian-Bearce 2016). Seorang pakar mengenai “Tatanan Dunia Baru” (*New World Order*) mengatakan bahwa Islam selama lebih dari empat belas abad telah menunjukkan kemampuan yang luar biasa untuk beradaptasi dengan kenyataan yang berubah (Chaitanya 1995, 100). Dan ideologi Islam diakui masih menjadi alternatif signifikan yang seringkali diimplementasikan dengan tujuan untuk membendung kecenderungan imperialis yang dirasakan dari model kapitalis-liberalis (Situmorang 2026).

Jejak kepemimpinan Sayid Ali Khamenei tidak sekadar mewujud dalam kebijakan politik formal, melainkan terekam kuat sebagai model kepemimpinan yang konsisten mengedepankan nilai kemanusiaan yang selaras dengan nilai keislaman dan berbasis wahyu. Sepanjang kiprahnya, beliau teguh pada pendiriannya untuk menolak segala bentuk hegemoni dan imperialisme modern yang merenggut kedaulatan bangsa. Kepemimpinannya tidak hanya menggerakkan nalar kolektif untuk melawan dominasi asing, tetapi juga bermanifestasi sebagai lentera yang menyalakan kembali cahaya peradaban Islam di era kontemporer. Tulisan ini hadir untuk membaca kembali dinamika perjalanan dan pemikiran Khamenei dengan melepaskan diri dari esensialisme (reduksionis).

RUMUSAN MASALAH DAN TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam studi ini dirumuskan melalui beberapa pertanyaan berikut: 1) Bagaimana pengaruh implementasi politik kepemimpinan Sayid Ali Khamenei dalam mentransformasi peradaban Islam di era modern? 2) Apa saja tantangan dan distorsi narasi yang dihadapi oleh model kepemimpinan Sayid Ali Khamenei dalam diskursus politik global? Dan, 3) Apa akar resiliensi yang mendasari stabilitas sistem kepemimpinan Sayid Ali Khamenei di tengah tekanan eksternal yang masif?

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, studi ini secara spesifik bertujuan untuk: *pertama*, melakukan analisis rekonstruksi

dan implementasi politik kepemimpinan ala Sayid Ali Khamenei sebagai penggerak transformasi peradaban Islam di era modern. *Kedua*, membongkar bentuk-bentuk distorsi narasi yang diproduksi oleh oposisi, khususnya oleh otoritas epistemik Barat yang mereduksi model kepemimpinan Sayid Ali Khamenei menjadi isu sektarianistik dan ambisi kekuasaan dalam diskursus global. *Ketiga*, mengeksplorasi akar resiliensi yang menjadi sumber stabilitas kepemimpinan Sayid Ali Khamenei, yang bernuansakan kemajuan, keadilan, dan kemanusiaan, di tengah tekanan eksternal yang terus menerus.

METODE DAN SIGNIFIKASI PENELITIAN

Studi ini menggunakan metode kualitatif untuk memperoleh deskripsi yang komprehensif (Bryman 2022, 207) dan representasi yang kontekstual mengenai Sayid Ali Khamenei dalam lintasan kepemimpinannya. Metode ini menggabungkan analisis konten terhadap karya-karya Sayid Ali Khamenei serta dokumentasi ceramahnya sebagai landasan epistemologis, dengan penelusuran literatur sekunder yang relevan sebagai ruang refleksi komparatif. Analisis konten (*content analysis*) adalah metode untuk mengevaluasi materi di dalam suatu teks. Proses ini bisa berupa penghitungan sederhana terhadap kata atau frasa yang muncul, dan atau pembongkaran makna yang lebih mendalam (Smith 2017, 1). Melalui pembacaan mendalam terhadap karya tulis dan catatan ceramah beliau sebagai sumber primer, eksplorasi ini diharapkan mampu membedah fondasi teologis dan filosofis yang mendasari kiprah Khamenei sebagai suluh peradaban Islam kontemporer, dan memetakan sejauh mana visi “Membumikan Wahyu, Menghidupkan Kemanusiaan” termanifestasi dalam realitas kepemimpinannya.

Jika literatur sebelumnya cenderung menelaah pemikiran Sayid Ali Khamenei pada fokus tematis tertentu (Putra 2024; Saputra 2024; Munandar 2024; Aleyamin et al. 2021; Mousavi et al. 2024), studi ini bermaksud untuk menghadirkan sebuah diskusi yang bernuansa dan dinamis mengenai bagaimana Sayid Ali Khamenei merespons tantangan

kontemporer yang bersifat multidimensi. Kebaruan yang ditawarkan dalam tulisan ini terletak pada upaya untuk menggarisbawahi dinamika pemikiran yang melingkupi figur beliau, sekaligus melakukan dekolonisasi terhadap distorsi narasi mengenai Sayid Ali Khamenei yang dibuat oleh Barat. Dengan demikian, studi ini berupaya untuk membongkar bias epistemis dalam kajian Barat sekaligus mendedahkan keteguhan Sayid Ali Khamenei dalam mengomandai peradaban Islam kontemporer.

TELAAH PUSTAKA

Penelusuran terhadap pemikiran politik Sayid Ali Khamenei dan memetakan pengaruhnya terhadap peradaban Islam kontemporer dikaji melalui karya-karyanya yang relevan sebagai sumber primer, mencakup empat karyanya yang berjudul: *The General Pattern of Qur'an* yang menjabarkan mengenai Ideologi Islam (Khamenei 1990, 33), *Lessons from the Nahjul Balaghah* yang menguraikan model kepemimpinan ala Nabi (Khamenei 1983, 10), *A 250 Years Old Person* yang menggambarkan perjuangan dan pertempuran politik yang dialami oleh para Imam (Khamenei 2014, 17), dan autobiografi yang memuat perjalanan hidupnya dalam *Cell no. 14* (Khamenei 2021). Selain itu, ucapan beliau dalam pidato-pidatonya yang didokumentasikan juga menjadi rujukan utama tulisan ini, utamanya yang diambil dari sumber *Khamenei.ir*.

Tulisan ini juga merujuk pada literatur terkini yang mengkaji Sayid Ali Khamenei sebagai refleksi komparatif atas pemikiran beliau. Tren terkini menunjukkan pembacaan yang berlapis terhadap pemikiran Sayid Ali Khamenei, setidaknya terbagi ke dalam tiga kelompok. Kelompok pertama mengkaji pemikiran Sayid Ali Khamenei secara tematis dan analisis deskriptif, yang mencakup tema-tema seperti kebijakan ekonomi, kebijakan politik nasional dan internasional, karakter spiritualnya, kebijakannya soal kesetaraan dan keadilan sosial, dan implementasi ajaran Islam dalam kebijakan politik Khamenei (Malakouti 2026; Arif 2026; Saputra 2024; Munandar 2024; Putra 2024; Mousavi et al. 2024; Aleyamin et al. 2021; Hovsepian-Bearce 2016).

Kelompok kedua terdiri dari kritik terang-terangan terhadap sistem pemerintahan yang diwakili oleh Sayid Ali Khamenei. Kritik ini dilontarkan oleh ulama Iran yang teridentifikasi sebagai alumni dari seminari (*hawzah*), namun menentang Revolusi Iran dan *Wilāyat al-Faqīh* dengan peninjauan dari sudut pandang Fikih (Kadivar 2015, 2011a). Cendekiawan lainnya yang sempat dilibatkan dalam sistem revolusi oleh Ayatullah Khomeini, berbalik menjadi kritikus paling vokal terhadap *Wilāyat al-Faqīh*, namun dengan menggunakan kaca mata epistemologi Barat (Amirpur 2015). Adapun kelompok terakhir adalah literatur terkini yang diterbitkan oleh institusi-institusi Barat mengenai riwayat hidup dan kepemimpinan Sayid Ali Khamenei, namun secara halus mendistorsi narasinya dengan menginstrumentalisasi isu sektarian untuk mendelegitimasi status kepemimpinan beliau sekaligus memperkuat superioritas narasi Barat (Ḥalaḡī 2023; Buonomo 2018; Alfoneh 2018; Sadjadpour 2009; Murphy 2008; Abusharaf 2013; Nomani 1988).

Celah penelitian yang ditemukan dalam literatur-literatur tersebut adalah masih minimnya literatur yang membahas mengenai dinamika pemikiran Khamenei dengan kritikus yang sempat tergabung dalam revolusi Iran, sekaligus belum disingkapnya bias orientalisme yang memotret Sayid Ali Khamenei secara negatif. Sebagian besar literatur belum mengintegrasikan secara utuh antara kedalaman spiritual, rasionalitas geopolitik, dan watak inklusif-selektif dari gagasan peradaban Sayid Ali Khamenei. Oleh karena itu, tulisan ini hadir untuk mengisi celah tersebut. Melalui judul “Living the Revelation, Awakening Humanity” (Membumikan Wahyu, Menghidupkan Kemanusiaan), studi ini menawarkan pembacaan alternatif dengan mendudukan pemikiran Sayid Ali Khamenei sebagai suluh peradaban Islam kontemporer yang dinamis, dialektis, dan berdaulat.

LANDASAN TEORI

Berangkat dari latar belakang dan kesenjangan penelitian yang sudah dipaparkan sebelumnya, tulisan ini mengadopsi beberapa teori

yang memadukan orientalisme menurut Edward W. Said (1979), neo-orientalisme menurut Julia Wurr (2022), dan perspektif dekolonial menurut Walter Mignolo dan Catherine E. Walsh (2018) sebagai instrumen analisis. Kombinasi kerangka teoretis ini digunakan sebagai upaya agar peninjauan ulang mengenai Sayid Ali Khamenei dalam tulisan ini tidak terjebak pada esensialisme yang, menurut Edward W. Said, didefinisikan sebagai cara pandang yang menyederhanakan suatu individu, kelompok masyarakat atau pemikiran keagamaan secara kaku (Said 1979, 240).

Membaca Sayid Ali Khamenei tidak akan luput dari diskusi mengenai ketangguhannya menjaga kedaulatan Iran di tengah pusaran krisis geopolitik. Dalam diskursus geopolitik modern, negara Iran yang dipimpin oleh Sayid Ali Khamenei masuk ke dalam kategori *Global South*, merujuk pada negara berkembang dan atau memiliki sejarah politik non-blok. Sementara negara-negara maju, seperti Amerika Serikat dan negara-negara Eropa, masuk ke dalam kategori *Global North*, dengan karakter standar hidup serta pendapatan per kapita yang sangat tinggi (Britannica 2026). Secara historis dan kultural, Iran termasuk ke dalam kategori Timur (*Orient*). Kategorisasi atau pembedaan antara Timur (*Orient*) dan Barat (*Occident*) ini muncul pertama kali dalam diskursus orientalisme.

Menurut Edward W. Said, Orientalisme adalah suatu pengetahuan tentang Timur (*the Orient*) yang menempatkan hal-hal bernuansa Timur ke dalam ruang kelas, pengadilan, penjara, atau buku panduan untuk diperiksa, diadili, didisiplinkan, atau diperintah. Singkatnya, orientalisme adalah seperangkat pembatasan dan pengungkungan cara berpikir. Esensi orientalisme adalah pembedaan yang tidak dapat dihapuskan antara superioritas Barat dan inferioritas Timur (Said 1979, 42). Namun, di zaman modern, diskursus ini memiliki cakupan geografis yang makin sempit seiring dengan peningkatan perhatiannya terhadap dunia Arab dan Islam yang dianggap sebagai ancaman bagi Barat, maka hadirilah neo-orientalisme. Neo-orientalisme adalah diskursus transnasional yang tidak lagi dikemukakan oleh para orientalis Barat saja. Pendekatannya jauh lebih subtil karena melibatkan penulis yang berasal dari Timur Tengah dan menggunakan subjektivitas pribumi mereka serta agensi yang baru mereka

temukan di Barat untuk membuat laporan-laporan bias tentang kawasan Timur agar tampak menjadi lebih otoritatif dan objektif (Wurr 2022, 3). Iran sebagai pemerintahan berbasis konstitusi Islam yang tangguh berdiri selama puluhan tahun tentu tak luput menjadi sasaran.

Sayid Ali Khamenei, merujuk pada cara pandang dan kisah perjuangannya dalam karyanya *Cell no.14*, sangat memahami realitas geopolitik tersebut. Ia memahami bagaimana Barat berupaya melancarkan beragam strategi perang lunak (*soft war*) untuk mempertahankan hegemoninya atas negara-negara Timur. Pemahaman beliau kurang lebih menemukan resonansinya dengan penjelasan mengenai asal usul munculnya diskursus dekolonialisme. Mignolo and Walsh dalam karyanya menjelaskan bahwa dekolonialisme lahir dari kesadaran pihak-pihak di belahan dunia Selatan (*the Souths of the World*) terhadap gencarnya perang pada dimensi epistemik dan eksistensial; sebuah perang yang mengalami feminisasi, rasialisasi, dan teritorialisme. Ini adalah wujud perang kapital global tentang bagaimana kolonialitas meregenerasi dan menyusun kembali dirinya sendiri, dan mengindikasikan kecenderungan yang semakin kuat dari cita-cita dominan Barat, serta dimensi konstitutif dari konsepsi dan proses dominan peradaban (Mignolo and Walsh 2018, 15).

Melalui sintesis ketiga kerangka teoretis tersebut, studi ini berupaya untuk mengokohkan fondasi dalam menguji data-data terkait Sayid Ali Khamenei. Atas dasar bangunan konseptual ini, bagian selanjutnya akan memaparkan hasil penelitian guna menjawab tiga pertanyaan kunci yang sebelumnya telah dipaparkan dalam bab pendahuluan.

HASIL PENELITIAN

Membumikan Wahyu: Model Kepemimpinan Sayid Ali Khamenei dalam Menggerakkan Peradaban Islam Kontemporer

Akar historis dan basis intelektual kepemimpinan Sayid Ali Khamenei tidak lahir dari ruang hampa, melainkan diletakkan secara fondasional sejak masa muda dan awal kedewasaannya selama dekade 1950-an dan 1960-an melalui interaksi intensif dengan dunia pemikiran (Ganji 2013,

24). Pada fase formatif inilah, ia menyaksikan secara langsung bagaimana ketegangan geopolitik antara peradaban Barat dan Dunia Ketiga (bekas jajahan/kolonial, ada ketimpangan ekonomi/miskin) beroperasi, yang kemudian semakin menguat pasca-Revolusi Iran akibat tekanan terus menerus dari Amerika Serikat. Pengalaman empiri ini mengantarkan Khamenei pada Kesimpulan strategis bahwa Washington (Amerika) secara inheren mengidap Islamofobia dan bertekad melakukan pergantian rezim di Iran (Ganji 2013, 25).

Meskipun bersikap kritis terhadap demokrasi liberal dan melihat kapitalisme Barat sedang berada dalam tren dekadensi jangka panjang yang tak terhindarkan, pandangan politik Khamenei tidak serta merta terjebak dalam sikap anti-Barat yang spontan atau bersifat fanatisme buta. Ia secara rasional memandang sains dan kemajuan teknologi sebagai 'kebenaran dari peradaban Barat' yang wajib dipelajari oleh umat Islam, sekaligus menegaskan bahwa al-Qur'an dan syariat membutuhkan penerjemahan kontekstual agar mampu menjawab tantangan modernitas (Ganji 2013, 25). Hal tersebut diiringi dengan melakukan kontekstualisasi hukum Islam ke dalam ruang publik, mengingat Islam pada tingkat dasarnya menawarkan prinsip-prinsip universal dan buka cetak biru teknis yang kaku untuk memecahkan problematika di abad ke-20 (Chaitanya 1995, 100).

Jika merujuk kembali pada sejarah Revolusi Iran, upaya menjaga kemurnian iman dari segala bentuk penyimpangan ditunjukkan secara kuat oleh Ayatullah Ruhullah Khomeini, pemimpin tertinggi pertama Iran, yang dipandang oleh publik Iran sebagai figure Imam karena keberaniannya melaksanakan kehendak Tuhan, meruntuhkan berhala tiran, dan memimpin kaum tertindas (*mustaḍ'afīn*) melawan kaum penindas (*mustakbirīn*). Manifestasi gerakan yang melahirkan sistem Pemerintahan Ulama (*Wilāyat al-Faqīh*) ini memicu kecemasan di ruang akademis dan jurnalistik Barat, yang seringkali mendeskripsikannya secara peyoratif seperti militansi, fanatisme, obskurantisme teologis yang dinilai kontradiktif dengan nalar modern (Chaitanya 1995, 107; Said 1979, 334). Namun, di mata dunia Muslim yang merindukan emansipasi,

sistem pemerintahan yang khas kepemimpinan profetik ini justru hadir sebagai sistem yang membebaskan umat dari kungkungan ‘Islam Amerika’ yang kompromistis, serta menyelamatkan identitas keislaman agar tidak sepenuhnya terbaratkan (Chaitanya 1995, 100).

Ketakutan global terhadap kebangkitan Islam politik ini sering kali bersumber dari cara pandang esensialis yang keliru dalam mengidentifikasi sejarah peradaban secara linier berdasarkan batas geografis dan dominasi sistem politik tertentu (Mamdani 2005). Ketika peradaban Barat mendefinisikan dirinya sendiri melalui lensa kekuasaan sekuler sejak era kolonialisasi, perdagangan budak, hingga Perang Dingin, Iran justru mendobrak kemapanan tersebut dengan membawa Islam dari balik panggung ke tengah panggung politik global (Mamdani 2005; Lawrence 2021, 39). Langkah revolusioner ini menjadi gerakan dekolonialisasi yang nyata (Mignolo and Walsh 2018) sehingga memantik kecemasan geopolitik yang besar karena memunculkan ancaman kembar bagi status quo; yakni menjadikan Islam sebagai penentu norma publik dan menempatkan imperialisme Barat sebagai penjahat (Lawrence 2021, 39). Implikasinya, terjadi politisasi identitas budaya secara masif di tingkat global di mana umat Islam kerap disudutkan dan dijadikan simbol dari “liyan yang buruk” (*the bad other*) di tengah benturan ideologi dunia antara kapitalisme-liberalisme di satu sisi, dan ideologi Islam sebagai alternatif pembendung hasrat imperialistik di sisi lain (Lawrence 2021, 96; Situmorang 2026).

Menghadapi tekanan eksternal dan stereotip global tersebut, Khamenei menegaskan bahwa model kepemimpinan dalam Islam tidak boleh terjebak menjadi sekadar nostalgia sejarah yang megah, melainkan harus bertumpu pada wawasan strategis (*baṣīrah*) dan integrasi antara keimanan, pengetahuan, serta keadilan (Ayatollah Seyyid Ali Khamenei 1990; Khamenei.ir 2020, 2015). Mengacu pada keteladanan para nabi dan para Imam terdahulu, arah perjuangan sesungguhnya dari politik Islam menolak pengosongan nilai spiritual dari realitas sosial, dan justru diarahkan untuk melawan distorsi doktrin yang kerap dilakukan oleh penguasa despotik (kejam) seperti Firaun dan Namrud di zona nyaman

kekuasaan (Khamenei 1990, 18–20). Berdasarkan pandangan ekonomi-politik Khamenei, ketika penindasan politik mendominasi suatu bangsa, maka aspek budaya dan ekonomi kaum tertindas akan ikut terdampak. Sebaliknya, jika masyarakat disadarkan kembali akan jati diri mereka atas dasar tauhid, maka mereka akan memiliki ketahanan untuk berdiri kokoh melawan sistem tirani yang paling stabil sekalipun (Khamenei 1983, 30–37). Komitmen teologis untuk membumikan wahyu inilah yang melandasi perumusan cita-cita jangka pendek para nabi, yaitu membangun sebuah ‘masyarakat tauhid dan masyarakat Ilahi’ yang berlandaskan pada keadilan, martabat, kemanusiaan, serta bersih dari kebodohan dan syirik (Khamenei 1990, 51–52).

Pada tingkat implementasi di dalam struktur domestic Republik Islam Iran, manifestasi dari masyarakat tauhid tersebut diterjemahkan oleh Khamenei melalui model pembagian otoritas sosial yang inklusif, di mana pembagian kelas penindas dan tertindas tidak mendapatkan tempat yang sah. Karena karakteristik sebuah pemerintahan Islam dinilai dari sejauh mana rakyat dari seluruh lapisan masyarakat bisa memiliki hak suara dan keterlibatan aktif dalam menentukan arah kebijakan politik nasional serta perjanjian komunitas. Bagaimanapun, legitimasi tindakan berani pemerintah dalam konstelansi internasional dinilai tidak akan pernah mewujudkan tanpa adanya kecenderungan dan dukungan riil dari basis massa rakyat baik dari kelas tinggi maupun kelas rendah (Khamenei 1983, 29). Menariknya, prinsip kedaulatan yang mandiri ini juga mengadopsi warisan politik lokal seperti konsep ‘keseimbangan negatif’ (*adami*) yang diwariskan oleh Mudarris, yakni sebuah prinsip radikal yang menegaskan bahwa sebuah bangsa tidak boleh memberikan upeti atau tunduk pada hegemoni Barat maupun Timur karena agama dan politik tidak dapat dipisahkan (Khamenei 1983, 43).

Sebagai peta jalan kontemporer pemerintahan Islam, Khamenei menekankan esensi pemikiran politiknya ke dalam tiga orientasi strategis yang wajib dijalankan secara simultan demi mewujudkan ketahanan peradaban Islam di tengah tantangan modernitas dan pusaran hegemoni

Barat. Orientasi tersebut mencakup penyelesaian masalah domestik dan penguatan ekonomi rakyat secara nyata, pembentukan interaksi yang luas dengan dunia internasional berbasis kerjasama dan harmoni, serta keharusan untuk tampil dengan berani menghadapi kekuatan hegemonis global dengan keyakinan dan ketegasan penuh (Khamenei.ir 2015). Menariknya, ketegasan sikap ini diimbangi dengan keterbukaan di dalam negeri Iran sendiri, di mana Khamenei justru menumbuhkan tradisi otokritik publik serta menuntut baik publik maupun jajaran pemerintah untuk menoleransi, menerima, dan tidak marah terhadap munculnya sudut pandang kritis yang berlawanan (Khamenei.ir 2017b, 2020). Melalui dialektika keterbukaan domestik dan ketegasan geopolitik inilah, model kepemimpinan Khamenei berupaya mentransformasi gagasan teoretis wahyu menjadi sebuah gerakan praksis yang hidup. Dinamika transformasi peradaban Islam di era modern inilah yang selanjutnya menuntut sebuah pembacaan yang lebih jeli dan objektif, guna menguji bagaimana pengaruh nyata dari implementasi politik tersebut di tengah pusaran konflik global.

Runtuhnya Narasi Hegemoni: Dekolonisasi Wacana Neo-Orientalis dan Otoritas Epistemik Sayid Ali Khamenei

Upaya membaca otoritas epistemik Sayid Ali Khamenei secara jeli menuntut adanya pembongkaran radikal terhadap ragam narasi geopolitik Barat yang sering kali bias dan reduksionis. Salah satu contohnya adalah penilaian Barat soal hobi beliau dalam membaca novel. Sejak masa mudanya, Khamenei memiliki kedekatan yang erat dengan dunia sastra dan sangat menyukai novel. Ia membaca karya penulis domestik seperti Muhammad Ali Jamalzadah, Sadeq Chubak, dan Sadeq Hedayat, sebelum akhirnya menemukan kesan yang lebih energik dalam karya-karya penulis klasik Barat dari Prancis, Rusia, dan Inggris. Di antara figur seperti Leo Tolstoy, Mikhail Sholokov, Honore de Balzac, dan Michel Zevaco, ia menempatkan Victor Hugo pada posisi tertinggi, bahkan secara eksplisit menyebut *Les Misérables* sebagai novel terbaik yang pernah ditulis dalam sejarah kemanusiaan (Ganji 2013, 27). Kedalaman apresiasi sastranya juga tampak melalui kekagumannya terhadap novel *Uncle Tom's Cabin*

(Pondok Paman Tom), sebuah karya abad ke-19 yang secara konsisten ia rekomendasikan kepada para manajer negara tingkat tinggi pada Maret 2002 guna memperjelas potret historis sistem pemerintahan Amerika Serikat. Melalui karya tersebut, Khamenei memediasi pemahamannya tentang rekam jejak kalam Amerika yang membangun fondasi negaranya di atas genosida penduduk asli suku Indian, serta tragedi kemanusiaan yang menimpa jutaan warga Afrika yang diculik dan diseret ke dalam perbudakan (Ganji 2013, 28).

Berkaitan dengan hal tersebut, sebagian analis Barat kerap menyalahpahami kegemaran membaca novel beliau dengan bias eurosentris yang berasumsi bahwa pandangan geopolitik Khamenei semata-mata dibentuk oleh ruang fiksi. Penilaian bias tersebut sengaja direproduksi untuk membangun narasi halus seolah-olah sikap kritis, ketegasan, dan visi anti-hegemoni Sayid Ali Khamenei hari ini terperangkap dalam imajinasi distopia sastra sayap kiri masa lalu. Padahal, jika dianalisis secara logis-konstruktif, penggunaan sastra klasik tersebut oleh Khamenei berfungsi sebagai cermin konfirmasi empiris atas apa yang secara nyata dilakukan oleh kebijakan imperialisme Barat di dunia nyata, mulai dari peristiwa Kudeta CIA 1953, pemberlakuan sanksi ekonomi sepihak, hingga dukungan historis terhadap kekejaman polisi rahasia SAVAK (Khamenei 2021). Guna meruntuhkan dominasi wacana tersebut, kerangka dekolonialitas hadir untuk menampakkan, membuka ruang, dan memajukan perspektif serta posisi tawar (*positionalities*) yang secara radikal berbeda, sekaligus menggeser rasionalitas Barat agar tidak lagi dijadikan sebagai satu-satunya kerangka kerja tunggal bagi eksistensi, analisis, dan pemikiran (Mignolo and Walsh 2018, 17). Melalui dekolonisasi wacana ini, akan terlihat jelas bahwa literatur bernuansa neo-orientalisme sejatinya sedang memproyeksikan rasa tidak aman (*insekuritas*) internal Barat akibat instabilitas ekonomi-politik mereka sendiri menjadi sebuah ketakutan terhadap “Sang Liyan” (*the bad other*), sehingga berfungsi sebagai diskursus perwakilan (*proxy discourse*) untuk menyembunyikan kerapuhan sistem neoliberal (Wurr 2022, 3).

Politisasi teks ilmiah dalam koridor neo-orientalisme ini umumnya diproduksi melalui judul-judul buku yang meyakinkan, dapat diakses secara bebas, dan ditulis oleh nama-nama bernuansa Timur Tengah demi menegaskan keotentikannya, seperti *The Regent of Allah* (Halaḡī 2023), *Reading Khamenei: The World View of Iran's Most Powerful Leader* (Sadjadpour 2009), hingga *Modern World Leader: Ali Khamenei* (Murphy 2008) yang semuanya diterbitkan di Washington. Pola narasi yang mereka replikasi cenderung seragam, yaitu menganalisis pergerakan politik Khamenei mutlak dari kacamata liberal Barat dengan menyisipkan prediksi bias perihal suksesi kepemimpinannya (Alfoneh 2018, 18). Pembingkaiannya ini diperkuat dengan pengenalan karakter tokoh yang ambivalen; di satu sisi melabeli Sayid Ali Khamenei sebagai individu tunggal paling kuat dalam rezim otokratis yang melakukan manajemen mikro, namun di sisi lain secara peyoratif meremehkan kapasitas teologis dan basis dukungannya dengan menggambarkan beliau sebagai sosok yang lemah, ragu-ragu, terisolasi, serta dimanipulasi oleh tim penasihat (Sadjadpour 2009, 1).

Tak hanya itu, literatur-literatur tersebut kerap melabeli Sayid Ali Khamenei secara tidak langsung sebagai diktator. Kendati orkestrasi pelabelan sebagai diktator agama yang represif dan fanatik terus diulang, narasi-narasi tersebut tidak dapat menafikan realitas objektif bahwa Khamenei merupakan figur paling berkuasa di dalam sistem pemerintahan Iran yang kompleks, yang berhasil melangkah jauh melampaui sejarah masa mudanya yang dilingkupi kemiskinan, deprivasi, penjara, dan pembuangan (Murphy 2008, 13). Lebih destruktif lagi, beberapa literatur luar terkadang menyisipkan propaganda yang memicu sentimen sektarianisme dan polarisasi sosial lewat penyederhanaan doktrin keagamaan (Nomani 1988, 18). Hal ini tampak dalam teks yang menuding bahwa doktrin kepemimpinan Syiah yang saat ini dipimpin oleh Khamenei secara inheren memosisikan seluruh khalifah historis maupun wakil rakyat di era modern sebagai perampas kekuasaan dan *ṭaghūt* (sewenang-wenang/jahat), sekaligus mengklaim adanya keyakinan bahwa siapa pun yang menolak konsep *imāmah* otomatis serupa dengan pengingkar *tawḥīd* yang akan berakhir di neraka (Nomani 1988, 18–19). Selain itu, tuduhan subjektif

juga diarahkan dengan melabeli Khamenei sebagai figur narsistik dan machiavellian karena dukungannya terhadap gerakan perlawanan regional seperti Hamas dan Hizbullah, meski narasi bias tersebut kerap terbantah sendiri oleh kutipan pidato asli Khamenei yang menegaskan prinsip keadilan universal: “tidak untuk mendominasi maupun didominasi”, serta memosisikan kemajuan teknologi dan kerja sama regional sebagai sarana mencapai keseimbangan moral dan martabat (Buonomo 2018, 42).

Tantangan terhadap otoritas epistemik Khamenei nyatanya tidak hanya datang dari luar, melainkan juga bersumber dari dinamika perdebatan internal di kalangan intelektual dan ahli fikih domestik Iran sendiri. Dalam tinjauan *foreign policy* misalnya, langkah intervensi Khamenei dinilai oleh sebagian pengamat bukan didorong oleh ideologi murni, melainkan kalkulasi praktis menjaga stabilitas faksi politik, di mana proses pemulihan hubungan (*rapprochement*) dengan Washington dipandang berbahaya bagi eksistensi sistem (Vatanka 2008, 1). Di tingkat keagamaan, kritik mengemuka dari figur seperti Muhsin Kadivar yang menguji keabsahan struktur *Wilāyat al-Faqīh* dalam lanskap teoretis (Kadivar 2011b, 207). Kadivar berargumen bahwa konsep tersebut merupakan amalgamasi historis yang tidak memiliki fondasi mutlak dalam fikih tradisional, melainkan produk interpretasi spesifik, sehingga ia menawarkan opsi demokrasi religiusitas berbasis akal budi (*reason*) yang mampu mengintegrasikan nilai-nilai Islam melalui mekanisme republikanisme yang bersandar pada kemaslahatan publik dan keadilan (Kadivar 2011b, 221–22).

Dialektika epistemik ini semakin meruncing ketika pemikir seperti Abdolkarim Soroush mulai merelativisasi pengetahuan institusi keagamaan dengan berargumen bahwa pemahaman agama, termasuk nalar keagamaan seorang *Wilāyat al-Faqīh*, hanyalah interpretasi manusia yang tidak luput dari kesalahan. Ketika Soroush menyebarkan gagasan di ruang publik bahwa wahyu merupakan produk budaya atau pengalaman pribadi nabi agar selaras dengan hak asasi manusia universal Barat, otoritas Iran membacanya sebagai ancaman dekonstruksi sekuler terhadap identitas

nasional di tengah kepingan geopolitik global. Bagi kubu konservatif dan selaras dengan posisi Khamenei, gagasan universalitas hak individu Barat harus dikritisi karena umat Islam secara kultural lebih memilih menaati hak-hak Tuhan demi kebaikan bersama umat (*umma*), di mana hak tidak melekat secara intrinsik-sekuler melainkan bersumber dari sakralitas hukum Tuhan (Amirpur 2015, 151).

Kompleksitas benturan wacana ini—bahkan hingga munculnya berita media internasional yang mengonfirmasi kematian beliau di era ketegangan geopolitik (Al Jazeera 2026)—menunjukkan betapa kokohnya ketahanan politik Iran. Pada akhirnya, kalkulasi para analis materialistik selalu mengalami kebuntuan karena mereka tidak memasukkan variabel spiritualitas ke dalam rumus mereka. Keteguhan posisi Khamenei selama puluhan tahun di bawah kepingan sanksi terberat menunjukkan adanya kesadaran *tawhīd* yang mentransformasi tekanan menjadi ujian kemuliaan, sebuah realitas praksis peradaban yang akan dibahas lebih mendalam pada subbab berikutnya.

Menghidupkan Spiritualitas Tauhid: Akar Kemanusiaan, Resiliensi, dan Keteguhan Sayid Ali Khamenei

Sebagai Pemimpin Agung kedua Republik Islam Iran, Sayid Ali Khamenei telah berhasil membimbing dan mengawal negaranya melewati serangkaian krisis domestik dan internasional yang krusial selama lebih dari sepertiga abad terakhir. Di bawah kepemimpinannya, struktur pemerintahan Islam ini terbukti memiliki tingkat resiliensi yang tinggi dalam menghadapi kontroversi politik internal, dinamika perang, sanksi ekonomi sepihak, hingga isolasi internasional. Alih-alih menyimpang dari koridor ideologisnya sebagaimana yang diharapkan oleh para penentang sistem, Iran justru menunjukkan ketahanan politik (*political viability*) yang kokoh pasca-wafatnya Ayatullah Khomeini pada tahun 1989. Keteguhan ini teruji secara nyata saat mengarungi dampak destruktif Perang Iran-Irak selama delapan tahun, menavigasi kebangkitan gerakan reformis pada tahun 1997 di bawah Presiden Mohammad Khatami, meredam pergolakan publik

tahun 1999, hingga membendung ancaman serangan militer dini (*pre-emptive strike*) oleh kekuatan asing (Hovsepian-Bearce 2016). Keberhasilan melewati ragam ujian makro tersebut membuktikan bahwa bagi Khamenei, pendiriannya yang berlandaskan *tawhīd* bukan sekadar prinsip teologis yang abstrak-melangit, melainkan sebuah fondasi epistemologis dan moral yang aktif menggerakkan seluruh aspek kehidupan sosial-politik. Melalui integrasi nalar tersebut, ia mengontekstualisasikan Al-Qur'an sebagai manhaj peradaban yang hidup guna menjembatani khazanah tradisi Islam dengan kompleksitas modernitas (Arif 2026).

Konsepsi teologis yang mewujud dalam tindakan nyata ini bersumber dari pandangan Khamenei mengenai signifikansi iman yang berkesadaran di dalam diri setiap individu. Iman yang benar, dalam perspektif beliau, wajib bersandar pada fondasi pemahaman, penajaman akal budi, dan kedalaman pengetahuan, bukan sebuah ekspresi dogmatis yang membabi buta atau sekadar ikut-ikutan (*taqlīd*) tanpa nalar (Khamenei 1990, 19). Karakteristik intelektual inilah yang membedakan iman hakiki dari model pengabdian keliru lainnya yang cenderung tidak masuk akal, rapuh saat diterpa krisis, dan hampa dari implementasi sosial. Hanya pikiran yang telah tercerahkan yang mampu menangkap hakikat kebenaran ini; jika tidak, iman berisiko mengalami penyempitan menjadi kefanatikan konyol yang membatu, yang pada gilirannya akan menutup rapat jalan keselamatan manusia. Oleh karena itu, Al-Qur'an secara tegas mengecam model keimanan kaum musyrik masa lalu yang kaku dan hanya berbasis pada kepatuhan imitasi (*taqlīd*) (Khamenei 1990, 20). Naskah suci secara konsisten mengaitkan keimanan dengan motivasi amal perbuatan demi mencapai kemaslahatan publik, di mana janji Allah perihal peneguhan eksistensi, keamanan, dan kejayaan di muka bumi mutlak digantungkan pada dinamisme gerak iman yang disertai dengan amal-amal kebajikan (Khamenei 1990, 21), sebagaimana tercantum dalam ayat berikut,

“Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan yang mengerjakan kebajikan bahwa Dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi sebagaimana Dia telah menjadikan orang-

orang sebelum mereka berkuasa; Dia sungguh akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah Dia ridai; dan Dia sungguh akan mengubah (keadaan) mereka setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka menyembah-Ku dengan tidak mempersekutukan-Ku dengan sesuatu apa pun. Siapa yang kufur setelah (janji) tersebut, mereka itulah orang-orang fasik.” (QS. Al-Nūr [24]:55)

Pencapaian kemakmuran peradaban tersebut menuntut kerelaan manusia untuk menyingkap hijab ketidaktahuan, ambisi personal, dan khayalan materialistik yang kerap mengaburkan daya pikir, sehingga cahaya (*nūr*) kebenaran dapat merasuk secara utuh ke dalam kalbu. Dalam bentangan sejarah yang panjang, proses pembebasan diri dari kebingungan dan kecemasan internal dipandang sebagai tantangan krusial yang jauh lebih sulit ditaklukkan ketimbang hambatan fisik eksternal. Melalui kejernihan batin yang bersumber dari ketenangan iman, seorang pejuang dinilai akan mampu menikmati energi spiritual yang melampaui kapasitas manusia biasa, sehingga memiliki keunggulan strategis dalam memitigasi gerakan musuh yang merintang jalannya. Manifestasi ketahanan jiwa ini tidak hanya berorientasi pada kemenangan di dunia, melainkan juga diproyeksikan sebagai instrumen untuk meraih ganjaran transendental di surga kelak setelah seluruh tugas kemanusiaan ditunaikan (Khamenei 1990, 24–25). Di tingkat sosial, prinsip *tawhīd* ini secara radikal menolak segala bentuk diskriminasi kelas yang kerap dilegitimasi secara keliru sepanjang sejarah, baik melalui mitos penciptaan kasta yang berbeda maupun klaim hak istimewa kelompok elit tertentu (Khamenei 1990, 39). Dengan memposisikan seluruh manusia setara di hadapan Tuhan Yang Maha Esa, tauhid secara otomatis meruntuhkan akar kemewahan oligarki sekaligus membangkitkan optimisme, kerja keras, keterbukaan pikiran, serta keberanian kaum tertindas dari belenggu ketakutan (Khamenei 1990, 42).

Ketahanan mental yang bersandar pada tauhid tersebut bukan sekadar teori meja makan, melainkan refleksi empiris yang dijalani Khamenei selama enam kali masa penahanannya di bawah rezim Syah

Iran yang represif. Di dalam jeruji besi, ia mentransformasi ruang isolasi menjadi basis penguatan mental bagi para pejuang lainnya dengan tetap konsisten berdakwah, memimpin salat berjemaah, dan menyampaikan khotbah meskipun di bawah bayang-bayang siksaan militer. Dalam sebuah fragmen interaksi di penjara, sifat kemanusiaannya yang inklusif tampak ketika ia merangkul sesama tahanan dengan mengutip pemikiran Presiden Soekarno dari Indonesia mengenai konsep kesatuan kebutuhan (*the unity of need*) yang disampaikan pada Konferensi Asia-Afrika di Bandung (Khamenei 2021, 188). Khamenei menegaskan bahwa kriteria fundamental dari solidaritas bangsa-bangsa yang berjuang melepaskan diri dari keterbelakangan bukanlah kesamaan agama, sejarah, atau budaya, melainkan adanya kesamaan nasib dan kebutuhan eksistensial dalam menghadapi penindasan. Pengalaman hidup yang jauh dari singgasana emas sejak masa kecil ini membentuk kapasitas batinnya untuk mampu berdamai dengan keadaan yang paling berat sekalipun (Khamenei 2021, 161).

Kematangan emosional yang ditempa lewat penderitaan fisik di masa muda inilah yang mendorong keterlibatan aktifnya sejak dini dalam mengorganisir gerakan politik mahasiswa, merumuskan esai revolusioner, dan menggelar sesi-sesi tafsir Al-Qur'an penumbuh kesadaran. Dari kepahitan sejarah tersebut, Khamenei membangun sebuah tesis sosiologis bahwa tanggung jawab keislaman menuntut adanya perenungan kolektif seluruh umat Islam tanpa terjebak dalam sekat-sekat perbedaan mazhab. Menurutnya, kecenderungan umat yang kerap menghabiskan energi untuk meneliti perselisihan masa lalu hanya akan memperkuat dendam historis dan membangkitkan emosi permusuhan yang merugikan masa depan Islam. Tanpa bermaksud menafikan akar sejarah yang membentuk identitas dan doktrin umat, ia menawarkan paradigma baru di mana bangunan kerja sama global wajib didasarkan pada visi strategis yang berorientasi ke depan (Khamenei 2021, 215). Langkah ini penting karena sepanjang sejarah, kebodohan dan prasangka terbukti telah memutarbalikkan jalan kemanusiaan serta memaksakan sistem kebatilan yang menjauhkan manusia dari kodrat alaminya. Atas dasar itulah, pengutusan para

nabi dipahami sebagai pelopor perubahan sosial secara mendasar dan menyeluruh (*social resurrection*) guna menggulingkan tradisi yang kosong dan menggantinya dengan sistem yang adil di bawah naungan agama Allah (Khamenei 1990, 49).

Dalam diskursus kontemporer, upaya membangkitkan tata sosial yang adil tersebut dirumuskan oleh Khamenei melalui konsep pembangunan peradaban Islam modern yang bertumpu pada pilar spiritualitas. Keluhuran spiritualitas Islam dipetakan ke dalam tiga dimensi utama yang saling berkelindan, yakni dimensi iman serta pengetahuan tentang hal gaib (metafisika), dimensi kepatuhan tindakan yang berbasis pada syariat, dan dimensi keindahan moral. Melalui pembagian ini, subjek spiritualitas diarahkan untuk menyentuh aspek akal spiritual, jiwa spiritual, dan tindakan spiritual secara kolektif demi melahirkan rasionalitas publik yang tercerahkan. Karakteristik dari peradaban spiritual dan Ilahi ini ditandai oleh meluasnya pandangan dunia yang penuh makna, di mana keimanan mewujudkan dalam bentuk komitmen tanggung jawab sosial yang direproduksi secara berkelanjutan. Dampak praktis dari dominasi rasionalitas spiritual ini adalah terciptanya kelimpahan kebajikan moral di ruang publik, sekaligus memperlemah dan menghilangkan kendali dari segala bentuk kekotoran serta pemberontakan moral yang merusak tatanan bangsa (Mousavi et al. 2024).

Lebih jauh, peran spiritualitas Islam dalam membentuk peradaban baru beroperasi pada tataran pembangunan infrastruktur berfikir umat melalui rekonstruksi akal, jiwa, dan tindakan. Sebagai sumber identitas, nilai spiritual memberikan orientasi yang bermakna bagi masyarakat modern agar tidak terombang-ambing oleh arus materialisme ekstrem. Pandangan dunia spiritual ini menyediakan fondasi teoretis yang kokoh sekaligus berfungsi memastikan ketahanan batin manusia dalam memerangi faktor-faktor internal yang berpotensi melemahkan kontinuitas peradaban. Efek pemandu lainnya adalah membangun imunitas kaum mukmin agar tidak mudah terpengaruh oleh obsesi kekuatan musuh maupun pemenuhan hasrat sensual yang dapat membelokkan mereka dari jalan lurus. Secara

komprehensif, pengaruh spiritualitas bagi peradaban baru ini mencakup enam dimensi strategis: peletakan dasar (*grounding*), pembentukan identitas (*identity-building*), pemberian pengetahuan (*knowledge-giving*), pemberian kekuatan (*strength/endurance-giving*), pembangunan imunitas (*immunity-building*), dan akselerasi (*speeding-up*) gerakan mencapai tujuan kemuliaan (Mousavi et al. 2024).

Dimensi kemanusiaan dari spiritualitas tauhid ini akhirnya terefleksikan secara nyata melalui komitmen Khamenei dalam hal keadilan dan kesetaraan, khususnya paling nyata dalam memuliakan posisi, martabat, dan hak-hak perempuan di ruang publik. Beliau mengkritik keras logika kapitalisme global yang dinilai eksploitatif karena cenderung mengerdilkan keluhuran perempuan menjadi sekadar komoditas ekonomi atau alat pemasaran berbasis daya tarik seksual (Buonomo 2018). Budaya objektifikasi dan konsumerisme Barat tersebut ditolak karena berpotensi melahirkan masyarakat yang egois, narsistik, dekadent, dan malas, yang pada gilirannya akan memudahkan kekuatan asing untuk mendominasi kembali kemandirian bangsa. Sebagai bentuk perlindungan, hak pertama perempuan yang wajib dijamin oleh negara dan keluarga adalah tegaknya keadilan dalam perilaku sosial serta keadilan di dalam institusi rumah tangga (Khamenei.ir 2015). Di bawah arahnya, Republik Islam mengimplementasikan jaminan hukum yang progresif meliputi penciptaan lingkungan bagi perkembangan kepribadian perempuan, perlindungan ibu hamil, jaminan khusus bagi janda dan lansia, serta penyerahan hak asuh anak yatim kepada ibu yang layak (Putra 2024, 102). Implikasi nyata dari kebijakan berlandaskan tauhid ini tampak pada lonjakan capaian pendidikan perempuan pasca-revolusi, di mana angka buta huruf perempuan yang awalnya mencapai 60% sebelum tahun 1978 berhasil ditekan secara masif hingga menempatkan keterwakilan perempuan di atas 55% dari total mahasiswa tahun pertama di universitas-universitas nasional saat ini (Elmi 2009).

PENUTUP

Kesimpulan

Wafatnya Sayid Ali Khamenei pada Februari 2026 tidak melumpuhkan fondasi kenegaraan Republik Islam Iran. Realita ini membuktikan bahwa nilai-nilai paradigmatik yang beliau tanamkan telah teruji secara lapangan dan mengakar sebagai basis institusional yang mandiri. Berdasarkan analisis dekolonial yang sudah dilakukan, studi ini mendekonstruksi wacana Neo-Orientalisme Barat dan kritikus diaspora yang cenderung mereduksi kepemimpinan beliau sebatas tirani kaku dan anti kritik. Reduksi tersebut runtuh oleh fakta sosiologis di lapangan, dimana ekosistem pemikiran domestik justru tumbuh dinamis melalui tradisi kritik teologis dan ruang perdebatan ilmiah yang tetap hidup di kalangan santri seminari (*hawzah*) merespons gagasan Revolusi Islam. Temuan ini juga sekaligus mematahkan analisis para Neo-Orientalis yang memprediksi kemungkinan terjadinya krisis penerus yang melemahkan sistem pemerintahan Iran setelah berakhirnya masa kepemimpinan Sayid Ali Khamenei.

Lebih lanjut, studi ini menegaskan bahwa ketakwaan dan etika profetik (*akhlāk nubuwwah*) di tangan Sayid Ali Khamenei tidak berhenti sebagai dogma semata, melainkan diterjemahkan secara aktual menjadi cetak biru peradaban Islam yang membumi. Melalui eksplorasi pandangan epistemik Sayid Ali Khamenei, studi ini menemukan bahwa pandangan dunia (*worldview*) Islam yang diimplementasikannya memiliki fondasi kebenaran yang mandiri, kuat, dan berbasis bukti, sehingga tidak membutuhkan sertifikat kelayakan dari pandangan politik liberal-sekuler Barat.

Pada puncaknya, studi ini membuktikan bahwa poros spiritualitas, resiliensi, dan pembelaan pada kemanusiaan adalah rahasia stabilitas sistem yang gagal dibaca nalar Barat yang sekularistik dan materialistik. Stabilitas institusional Iran yang melampaui masa transisi pasca-wafatnya beliau mempertegas bahwa warisan utamanya bukanlah kekuasaan personal, melainkan sistem pemerintahan yang digerakkan oleh ketajaman intelektual dan kedalaman spiritual beliau di atas fondasi nilai-nilai Islam.

Kesimpulan ini mengukuhkan signifikansi dari kiprah Sayid Ali Khamenei dalam membumikan wahyu dan menghidupkan kemanusiaan, yakni melalui sebuah sikap politik yang berdaulat yang menolak standardisasi tunggal atau hegemoni Barat, sekaligus membuktikan bahwa nilai keilahian yang bersumber dari wahyu mampu merespons tantangan modernitas secara rasional, sistematis, etis dan emansipatif.

Saran

Krisis kemanusiaan kontemporer menunjukkan adanya kebutuhan mendesak akan cara pandang alternatif yang lebih berpihak pada martabat manusia, di luar standardisasi Barat yang selama ini mendominasi. Dalam konteks inilah, gagasan Sayid Ali Khamenei yang mengarusutamakan nilai Islam, spiritualitas, dan kemanusiaan menjadi relevan untuk dikaji secara mendalam sebagai upaya menyalakan suluh bagi arah perkembangan Peradaban Islam di era kontemporer.

Tulisan ini menyarankan kepada para peneliti studi Islam maupun hubungan internasional untuk melakukan kajian lanjutan yang lebih luas mengenai pemikiran beliau. Khususnya, untuk mengamati bagaimana nilai-nilai etika profetik (*akhlāk nubuwwah*) yang berbasis pada spiritualitas Islam dapat tetap diterapkan dalam kebijakan nyata di lapangan, terutama dalam masa transisi kepemimpinan pasca-wafatnya Sayid Ali Khamenei pada awal tahun 2026.

Akhirnya, kehadiran tulisan ini diharapkan menjadi pemantik diskusi bagi para akademisi lainnya untuk melahirkan sudut pandang baru yang belum terelaborasi di sini, sehingga ke depannya dapat berkontribusi dalam merumuskan model alternatif bagi kebangkitan Peradaban Islam yang mandiri, adil, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abusharaf, Rogaia. 2013. *Social Change in Post-Khomeini Iran*. No. 10. Center for International and Regional Studies.
- Aleyamin, Hamed, Mohammad Hadi Aleyamin, Mohammad Hosein Mokhtari, and Majid Qorbanali Doulabi. 2021. "Analysis of the Accompaniment of Justice and Politics in Imam Khamenei's Political Jurisprudential Thought." Pt. 27-42. *Journal of Contemporary Research on Islamic Revolution* 3 (10).
- Alfoneh, Ali. 2018. *Political Succession in the Islamic Republic of Iran: The Rise of the Revolutionary Guards*. (Washington) 1 (1).
- Al Jazeera (Al Jazeera). 2026. "Photos: Tens of Thousands in Iran Mourn Khamenei's Killing." <https://www.aljazeera.com/gallery/2026/3/1/thousands-in-iran-mourn-khameneis-killing>.
- Amirpur, Katajun. 2015. *New Thinking in Islam: The Jihad for Democracy, Freedom and Women's Rights*. Gingko Library.
- Arif, M. Syamsul, ed. 2026. *Dinamika Pemikiran Sayid Ali Khamenei Menjawab Tantangan Masa Kini*. Sadra Press.
- Britannica. 2026. "Global North and Global South | Definition, Countries, Differences, History, Map, & Facts." <https://www.britannica.com/topic/Global-North-and-Global-South>.
- Bryman, Alan. 2022. *Social Research Methods*. Oxford University Press.
- Buonomo, Thomas. 2018. *Iran's Supreme Leader: An Analysis of His Hostility Toward the U.S. and Israel*. XXV (1): 33-45.
- Chaitanya, Rachna. 1995. *The New World Order*. Radiant Publisher.
- Daniller, Andrew. 2026. "Americans Remain Critical of Trump Administration's Approach to Iran." Political Issues. *Pew Research Center*, May 1. <https://www.pewresearch.org/short-reads/2026/05/01/americans-remain-critical-of-trump-administrations-approach-to-iran/>.
- Elmi, Zahra Mila. 2009. "Educational Attainment in Iran." *Middle East Institute*. <https://mei.edu/publication/educational-attainment-iran/>.

- Ganji, Akbar. 2013. "Who Is Ali Khamenei? The Worldview of Iran's Supreme Leader." *Foreign Affairs* 92 (5): 24–48.
- Ḥalaḡī, Mahdī. 2023. *The Regent of Allah: Ali Khamenei's Political Evolution in Iran*. With Washington Institute for Near East Policy. Rowman & Littlefield.
- Hovsepian-Bearce, Yvette. 2016. *The Political Ideology of Ayatollah Khamenei: Out of the Mouth of the Supreme Leader of Iran*. UCLA Center for Middle East Development (CMED) Series 9. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315748351>.
- Kadivar, Mohsen. 2011a. "From Traditional Islam to Islam as an End in Itself." *Die Welt Des Islams* 51 (3–4): 459–84. <https://doi.org/10.1163/157006011X611632>.
- Kadivar, Mohsen. 2011b. "Wilayat Al-Faqih and Democracy." In *Islam, the State, and Political Authority: Medieval Issues and Modern Concerns*, 1st ed, edited by Asma Afsaruddin. Middle East Today. Palgrave Macmillan.
- Kadivar, Mohsen. 2015. "Ijtihad in Usul Al-Fiqh: Reforming Islamic Thought through Structural Ijtihad." XX-XXVII. *Iran Nameh* 30 (3).
- Khamenei, Sayid Ali. 1983. *Lessons from the Nahjul Balaghah*. Translated by Hossein Vahid Dastjerdi. Al-Islam.org.
- Khamenei, Sayid Ali. 1990. *The General Pattern of Islamic Thought in the Qur'an*. Islamic Propagation Organization.
- Khamenei, Sayid Ali. 2014. *A 250 Years Old Person, Statements and Expression of the Great Leader and Guardian On the Political Combats and Stuggles of Infallible Imams*. Lebanon.
- Khamenei, Sayid Ali. 2021. *Cell No. 14*. Amin Publication.
- Khamenei.ir (KHAMENEI.IR). 2015. "Enemies Trying to Infiltrate Decision Makers." <https://en.khamenei.ir/news/139144>.
- Khamenei.ir (Khamenei.Ir). 2017a. "The Islamic Revolution Is a New Idea for Humanity's Life." <https://en.khamenei.ir/news/139046>.

- Khamenei.ir (KHAMENEI.IR). 2017b. "The Islamic Revolution Moved the People into the Center of Political Decision Making." <https://en.khamenei.ir/news/139065>.
- Khamenei.ir (KHAMENEI.IR). 2020. "The Three Main Elements of the Islamic Model for Governing: Faith, Knowledge & Justice." <https://en.khamenei.ir/news/138909>.
- Khamenei.ir (KHAMENEI.IR). 2025. "The Islamic Republic Has Refuted Western Logic Regarding the Issue of Women." <https://en.khamenei.ir/news/149044>.
- Lawrence, Bruce B. 2021. *The Bruce B. Lawrence Reader: Islam beyond Borders*. Edited by Ali Altaf Mian. Duke University Press.
- Malakouti, Zeynab. 2026. "The Khamenei Succession: Hereditary Power and Democracy in Iran." *IAI Commentaries* 14 (26).
- Mamdani, Mahmood. 2005. *Good Muslim, Bad Muslim: America, the Cold War, and the Roots of Terror*. Potter/Ten Speed/Harmony/Rodale.
- Matthiesen, Toby (The Jakarta Post). 2026. "God on Their Side: Faith in the Politics of War - Academia." <https://www.thejakartapost.com/opinion/2026/04/01/god-on-their-side-faith-in-the-politics-of-war.html>.
- Mignolo, Walter, and Catherine E. Walsh. 2018. *On Decoloniality: Concepts, Analytics, Praxis*. On Decoloniality. Duke University Press.
- Mousavi, Seyed Hadi, Seyed Ahmadreza Shahrokhi, and Nasibeh Ghodsifar. 2024. "The nature and role of spirituality in modern Islamic civilization from the point of view of Ayatollah Khamenei." *Scientific Journal Of New Islamic Civilization Fundamental Studies* (IR), no. Online First (February). <https://doi.org/10.22070/nic.2024.18493.1281>.
- Munandar, Siswoyo Aris. 2024. "The Implementation of Islamic Teachings in the Political Practices of Seyyed Ali Khamenei." *ISSUE: Journal of Islamic Studies for Universal Dialogue* 2 (1): 87–122.
- Murphy, John. 2008. *Ali Khamenei*. Modern World Leaders. Chelsea House.

- Nomani, Mohammad Manzoor. 1988. *Khomeini, Iranian Revolution and the Shi'ite Faith*. Furqan Publications.
- Putra, Riko. 2024. "Equality Towards a Civil Society: Analysis of Individual Quality Towards Seyyed Ali Khamene'i's National Identity." *ISSUE: Journal of Islamic Studies for Universal Dialogue* 2 (2): 79-113.
- Sadjadpour, Karim. 2009. *Reading Khamenei: The World View of Iran's Most Powerful Leader*. Carnegie Endowment for International Peace.
- Said, Edward W. 1979. *Orientalism*. Vintages books.
- Saputra, Andi Novriansyah. 2024. "The Ideas of Political Ethics of Seyyed Ali Khamenei: An Analysis of The Policies of An Islamic Leader on a National and International Scale." *ISSUE: Journal of Islamic Studies for Universal Dialogue* 2 (1): 61-84.
- Situmorang, Mangadar (The Jakarta Post). 2026. "Autocratic and Self-Interest Driven Leadership Started the Iran War - Academia." <https://www.thejakartapost.com/opinion/2026/03/12/autocratic-and-self-interest-driven-leadership-started-the-iran-war.html>.
- Smith, Jason A. 2017. "Textual Analysis." In *The International Encyclopedia of Communication Research Methods*, 1st ed., edited by Jörg Matthes, Christine S. Davis, and Robert F. Potter. Wiley. <https://doi.org/10.1002/9781118901731.iecrm0248>.
- Vatanka, Alex. 2008. "Ali Khamene'i: Iran's Most Powerful Man." *The Middle East Institute*, no. 10 (March).
- Wahyuni, Willa (hukumonline.com). 2026. "Pemicu Serangan AS-Israel ke Iran: Ancaman Nuklir dan Politik Regional." <https://www.hukumonline.com/berita/a/pemicu-serangan-as-israel-ke-iran--ancaman-nuklir-dan-politik-regional-lt69a5698e46ec0/>.
- Wurr, Julia. 2022. *Literary Neo-Orientalism and the Arab Uprisings: Tensions in English, French and German Language Fiction*. Edinburgh Studies of the Globalised Muslim World. Edinburgh university Press.